

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Citra Ayu Novilia

NPP. 31.0216

*Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

*citraayunovilialistrik@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dra. Siti Zulaika, M.Si

## ABSTRACT

**Problem (GAP):** The issues identified regarding social assistance commonly encountered include social assistance not aligning with regulations, resulting in beneficiaries not being targeted accurately. Another issue is inactive recipients still receiving social assistance, and some recipients receiving social assistance multiple times or duplicatively. Furthermore, the intended targets for social assistance do not receive the predetermined assistance. **Objective:** This research aims to understand the implementation of social assistance policies in addressing poverty in the Sako District of Palembang City, South Sumatra Province. It also seeks to identify the supporting and inhibiting factors in the implementation of social assistance policies in addressing poverty in the Sako District of Palembang City, South Sumatra Province, as well as the efforts made to overcome obstacles in the implementation of social assistance policies. **Method:** This descriptive research employs a qualitative approach. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data collection, data reduction, data presentation, and data verification. **Results/Findings:** The implementation of social assistance policies provided to the residents of the Sako District is deemed satisfactory. The resources available at the Social Affairs Office determine the success of the social assistance program provided by the Palembang City Social Affairs Office. **Conclusion:** Supporting factors in the implementation of social assistance policies in addressing poverty can be identified when communication plays a significant role in supporting policy success. Inhibiting factors in the implementation of social assistance policies in addressing poverty can be identified when there is data inconsistency with the number of social assistance recipients, leading to the distributed social assistance not matching the predetermined recipient list. Efforts made by the Palembang Provincial Social Affairs Office to implement this social assistance policy include conducting re-registration and direct observation to ensure that recipients truly are those in need.

**Keywords:** Social Assistance, Policy, Resources

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Masalah yang ditemukan berkaitan dengan bantuan sosial yang sering dijumpai yaitu bantuan sosial tidak sejalan dengan ketentuan sehingga pihak yang menerima manfaat tidak tepat sasaran. Masalah lain yang ditemukan adalah penerima sudah non aktif tapi masih mendapatkan bansos dan ada pula penerima bantuan sosial yang mendapatkan bantuan sosial lebih dari sekali atau ganda. Kemudian sasaran yang harusnya memperoleh bantuan sosial tidak mendapatkan bantuan sosial yang sudah ditentukan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan bansos di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. **Metode:** Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. **Hasil/Temuan:** Implementasi kebijakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Sako sudah baik. Sumber daya yang ada pada Dinas Sosial menjadi penentu keberhasilan program bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Palembang. **Kesimpulan:** Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan dapat diketahui jika komunikasi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan dapat diketahui jika ketidaksesuaian data dengan jumlah penerima bantuan sosial sehinbarusgga bantuan sosial yang dibagikan tidak diterima sesuai dengan daftar penerima yang sudah ditentukan. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Palembang untuk melaksanakan kebijakan bantuan sosial ini adalah melakukan pendataan ulang dan melakukan observasi langsung supaya masyarakat yang menerima bantuan sosial benar-benar orang yang membutuhkan.

**Kata Kunci:** Bantuan Sosial, Kebijakan, Sumber Daya

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang sifatnya multidimensi. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks berhubungan dengan berbagai macam dimensi meliputi sosial, ekonomi, budaya, politik dan waktu (Ishak, 2013). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik total masyarakat miskin di negara Indonesia pada tahun 2022 mencapai 26,42 juta. Total ini mengalami peningkatan sebanyak 1,28 juta orang dari tahun 2021. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Sumatera. Ibukota Sumatera Selatan adalah Palembang. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki persentasi penduduk miskin sebesar 9,36% sehingga hal tersebut harus ditanggulangi oleh pemerintah setempat. Angka pengangguran yang ada di Sumatera Selatan apabila tidak diatasi dengan cepat akan meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu dibutuhkan peran serta dari Pemerintah untuk dapat menanggulangi masalah kemiskinan tersebut (Gunarsa,2019).

Kemiskinan merupakan masalah yang harus ditanggulangi dengan cara yang tepat. Kemiskinan memberikan dampak yang panjang bagi kesejahteraan masyarakat kemiskinan membuat masyarakat menjadi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu untuk membantu masalah kemiskinan Dinas Sosial Kota Palembang membentuk kebijakan pemberian

bantuan sosial agar bantuan sosial yang diberikan berguna bagi masyarakat miskin yang ada di Kota Palembang. Upaya menanggulangi kemiskinan harus dilakukan karena masalah ini adalah masalah yang mempunyai tingkat kesulitan yang dikategorikan sulit untuk ditanggulangi, mempunyai hubungan terhadap aspek-aspek pada ruang lingkup sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya (Kalalo et al,2019). Masalah tersebut harus segera ditanggulangi sehingga untuk menanggulangi masalah tersebut mempunyai beberapa strategi dalam meminimalisir serta menekan angka peningkatan kemiskinan (Setyadi & Indriyani,2021). Peningkatan total masyarakat miskin di Palembang terjadi secara signifikan. Kemiskinan yang terjadi di Palembang akan memberikan dampak panjang. Informasi tentang jumlah kemiskinan sangat dibutuhkan Dinas Sosial dalam menanggulangi masalah kemiskinan serta untuk menentukan target serta harapan memperbaiki situasi masyarakat kedepannya lebih tepat sasaran. Peningkatan jumlah penduduk di Palembang mengakibatkan total penduduk semakin pesat. Sesuai dengan Peraturan Presiden No 63 Tahun 2017 pasal 3 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai membahas belanja bantuan sosial pengeluaran dalam bentuk transfer uang, barang atau jasa yang diperoleh dari pemerintah yang tujuannya untuk membantu kondisi masyarakat tidak mampu serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari resiko sosial, meningkatkan keterampilan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Masalah yang ditemukan berkaitan dengan bantuan sosial yang sering dijumpai yaitu bantuan sosial tidak sejalan dengan ketentuan sehingga pihak yang menerima manfaat tidak tepat sasaran. Masalah lain yang ditemukan adalah penerima sudah non aktif tapi masih mendapatkan bansos dan ada pula penerima bantuan sosial yang mendapatkan bantuan sosial lebih dari sekali atau ganda. Kemudian sasaran yang harusnya memperoleh bantuan sosial tidak mendapatkan bantuan sosial yang sudah ditentukan. Implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan evaluasi. Terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi bentuk penilaian keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palembang sehingga dapat dikatakan efektif atau perlu perbaikan. Aspek yang dapat menjadi bentuk penilaian tersebut mencakup anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya, dan lain sebagainya.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan oleh Mariama Qamariah, Afifuddin, Suyeno berjudul Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu) memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sama-sama meneliti tentang bantuan sosial. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan Miles & Hubberman. Teori Mazmanian & Sabatier Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada teori yang digunakan yaitu Teori Mazmanian & Sabatie, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan teori Edward III. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui jika bansos bisa membantu memenuhi kebutuhan lansia. Bansos yang dibagikan digunakan oleh lansia untuk mencukupi kebutuhannya agar bisa mengkonsumsi makanan serta membeli beberapa kebutuhan yang diperlukan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Yosua A, Mandolang, Florence Daicy Lengkong, Salmin Dengo berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sama-

sama meneliti tentang implementasi sebuah program. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini dilaksanakan di Minahasa dan program yang dilaksanakan yaitu keluarga harapan, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan di Kota Palembang dengan meneliti implementasi bantuan sosial. Perbedaan lain yang ada pada kedua penelitian ini yaitu tujuan penelitian, harapan dari penelitian yang akan dilaksanakan kedepannya. Berdasarkan hasil penelitian program keluarga harapan dapat dilaksanakan dengan baik. Masyarakat sangat antusias dengan pelaksanaan program sehingga program dinilai sudah bisa terlaksana dengan efektif. Penelitian yang dilaksanakan oleh Masruroh, Somariah Fitriani, Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smk Ypk Kesatuan Jakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi program. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu penelitian sebelumnya fokus dengan program bantuan operasional sekolah di Jakarta, sedangkan penelitian ini fokus dengan program bantuan sosial di Kota Palembang. Perbedaan lainnya pada kedua penelitian ini yaitu terletak di tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan jika implementasi program di SMK YPK Kesatuan Jakarta sudah cukup baik. Pemberian bantuan BOS memberikan dukungan terhadap kelancaran proses pendidikan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rahmi Fadilah (2021), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Menangani Dampak Penyakit Virus Corona 2019 di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, tidak berjalan dengan lancar dan baik. Faktor pendukung termasuk munculnya sosialisasi program pengeluaran Dana Desa BLT. Namun, faktor penghambat adalah kurangnya ketegasan dalam sikap para pelaksana. Dari perspektif fiqh siyasah, tercatat bahwa dalam pengelolaan keuangan negara, berdasarkan distribusi pengeluaran negara, keadilan sangat penting. Namun, pihak berwenang terkait tidak bertindak dengan adil dalam hal ini. Penelitian Morado (2021), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran bansos COVID-19 cukup baik, namun belum menjangkau seluruh penerima manfaat. Ada permasalahan terkait data penerima manfaat dan rendahnya kualitas bahan sembako. Faktor pendukung penyaluran bansos COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan masyarakat rentan adalah kerjasama yang dilakukan pejabat pelaksana dengan berbagai instansi lain. Dukungan publik merupakan semangat dari masyarakat dan komitmen dari pejabat pelaksana. Faktor penghambat pelaksanaan penyaluran bansos COVID-19 adalah adanya kesimpangsiuran data penerima manfaat yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan data yang disampaikan oleh RT/RW setempat. Penelitian yang dilaksanakan oleh Lidya Britania Putong, Calvin Edo Wahyudi (2022), Standar kebijakan dan sasaran program, sasaran program memiliki arah yang jelas namun untuk standar keijakan tidak ada. Sumber daya, mengenai sumber daya manusia serta sarana dan pra sarana sudah terpenuhi dengan baik namun masih terdapat kekurangan dana. Komunikasi dan Karakteristik sudah terimplementasi dengan baik. Keterlibatan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari segi ekonomi dan politik sudah mendukung namun dari segi sosial masyarakat meresahkan mengenai ketidakmerataan bantuan. Disposisi sudah baik. Aspek Lain yaitu bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tidak diberi tahu mengenai alasan tidak mendapatkan sehingga dalam hal ini dinyatakan masih kurang.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitian tentang implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan bansos di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Van Meter dan Horn. Sumber data pada penelitian ini yaitu semua bentuk informasi yang didapatkan menggunakan observasi serta wawancara. Berdasarkan pemaparan yang dituliskan oleh Loeffland dalam Hardani (2020:75) , sumber data utama pada penelitian kualitatif yakni kata-kata,serta tindakan. Data Primer yang peneliti ambil di lapangan adalah hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data sekunder yang diambil pada penelitian ini yaitu data penerima bansos, jumlah bansos yang disalurkan, serta data pendukung lain yang bersumber dari internet maupun media lainnya yang berguna dalam penelitian.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan bansos di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

### **3.1 Implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan**

Dalam pendataan membutuhkan basis data yang diperoleh dari Kemensos sudah terdaftar sebagai penerima bantuan (DTKS) atau terdaftar di aplikasi SIKS-NG: <https://siks.kemosos.go.id/>. Data dikirim ke Dinas Sosial Kab/Kota dan disampaikan ke Dinsos Provinsi. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan, penyesuaian, verifikasi validasi data dan musyawarah Pengolahan dan penyesuaian sumber bansos dan subsidi pemerintah (Maidah et al,2018).

Pemadanan NIK dan alamat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota. Verifikasi Validasi DTKS oleh Petugas Pendata atau oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di Puskesmas Desa. Musyawarah Kelurahan dan Desa (Muskel/ Musdes) yang dipimpin oleh Kades/Lurah untuk membuat penetapan usulan atau penghapusan usulan yang akan disampaikan ke Pusdatin Kemensos. Setelah pengadaan siap, PT Pos melakukan pengiriman dan pendistribusian sesuai alokasi bansos yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Nazir,2017).

Sesuai dengan proses pencairan bansos yang diberikan tahun lalu maka dapat diketahui jika bantuan sosial akan dibagikan menggunakan 4 tahap yang mencakup :

- a) Tahap pertama : Januari – Maret 2024
- b) Tahap kedua : April – Juni 2024
- c) Tahap ketiga : Juli – September 2024
- d) Tahap Keempat : Oktober – Desember 2024

Sasaran yang dituju dari kebijakan bantuan sosial ini juga disesuaikan dengan harapan yang ingin dicapai pada kebijakan. Maka dari itu kebijakan bantuan sosial diharapkan bisa membantu untuk mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Parihala & Samson (2019).

Berdasarkan dari indikator sumber daya menjadi faktor keberhasilan sebuah kebijakan salah satunya adalah anggaran. Anggaran yang diberikan sangat berguna untuk keberhasilan kebijakan bantuan sosial. Anggaran kebijakan bantuan sosial ini membantu Dinas Sosial Kota Palembang memberikan bantuan kepada masyarakat agar bisa membantu masyarakat miskin di Kecamatan Sako. Di bawah ini adalah jumlah penerima bantuan sosial di Kecamatan Sako diantaranya :

**Tabel 3.1**

**Jumlah Penerima Bansos di Kecamatan Sako Tahun 2023**

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENERIMA BANSOS (KK)	ANGGARAN SETIAP PENERIMA
1	Sako	186	Rp.600.000
2	Sako Baru	102	Rp.600.000
3	Sialang	130	Rp.600.000
4	Suka Maju	80	Rp.600.000

Sumber : Kepala Dinas Sosial,2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jika pihak yang menerima bantuan sosial setiap keluarganya di Kecamatan Sako. Anggaran yang diterima untuk pembagian bansos sebesar Rp.600.000. Dapat disimpulkan dari dimensi sumber daya, jika sumber daya manusia dan sumber daya anggaran merupakan dua hal yang sangat dibutuhkan pada penelitian ini. Sumber daya manusia yaitu aparatur yang sudah melaksanakan tugasnya. Sementara sumber daya anggaran adalah anggaran yang dibutuhkan untuk membantu keberhasilan kebijakan bantuan sosial.

Berdasarkan hasil observasi mengenai indikator hubungan komunikasi terkait masalah bantuan sosial di Palembang menunjukkan beberapa kendala utama. Penyaluran bantuan sosial di kota ini sering tidak tepat sasaran karena data penerima yang tidak diperbarui. Banyak warga yang sebenarnya sudah tidak miskin lagi tetap terdaftar sebagai penerima bantuan, sehingga mengakibatkan distribusi yang tidak efektif. Masalah ini diakibatkan oleh kurangnya pembaruan data oleh dinas terkait, yang seharusnya dilakukan setiap enam bulan. Untuk mengatasi hal ini, upaya pendataan ulang seperti Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) telah dilakukan untuk memastikan bantuan sosial dapat disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Palembang menunjukkan beberapa aspek penting dalam komunikasi dan koordinasi terkait distribusi bantuan tersebut (Putri & Mukramin, 2023).

Kegiatan yang dilaksanakan sudah cukup maksimal. Kegiatan mulai dari pembagian bantuan sosial, penyebaran informasi tentang bantuan sosial, penentuan sasaran dan penerima bantuan sosial

dilaksanakan dengan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk memastikan efektivitas lebih lanjut, Dinas Sosial Palembang melaksanakan pendataan ulang melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk memperbarui data penerima dan memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Di bawah ini adalah data efektivitas kegiatan bantuan sosial di Kecamatan Sako Kota Palembang :

**Tabel 3.2**

**Efektivitas Kegiatan**

<b>Aspek</b>	<b>Jumlah / Status</b>
Persentase penerima yang tepat sasaran	86%
Pendataan Ulang (Regsosek)	Dilakukan mulai oktober 2022

Sumber : Kepala Dinas Sosial, 2024

Kendala yang ditemukan pada efektivitas bantuan sosial yaitu pembaruan informasi yang tidak rutin dan verifikasi data yang kurang memadai. Solusi yang digunakan termasuk pendataan ulang dan evaluasi berkala (Rohman et al,2023).

Kebijakan dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga tujuan dari kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik. Dapat disimpulkan berdasarkan dengan dimensi karakteristik agen pelaksana dapat diketahui jika setiap pihak mempunyai tanggung jawab masing-masing. Setiap pihak memiliki tanggung jawab supaya kebijakan dapat terlaksana. Dinas Sosial Kota Palembang selalu berusaha untuk melaksanakan kebijakan dengan sangat baik.

**3.2 Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan**

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan dapat diketahui jika komunikasi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Hal ini dikarenakan jika komunikasi dalam melaksanakan kebijakan bantuan sosial ini tidak maksimal maka hal-hal yang merugikan mungkin dapat terjadi contohnya korupsi dana bantuan sosial, dan penyelewengan tanggung jawab. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan dapat diketahui jika ketidaksesuaian data dengan jumlah penerima bantuan sosial sehingga bantuan sosial yang dibagikan tidak diterima sesuai dengan daftar penerima yang sudah ditentukan.

**3.3 Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan bansos di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan**

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Palembang untuk melaksanakan kebijakan bantuan sosial ini adalah melakukan pendataan ulang dan melakukan observasi langsung supaya masyarakat yang menerima bantuan sosial benar-benar orang yang membutuhkan.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Sesuai dengan hasil perbandingan peneliti yang dilakukan setara dengan observasi berdasarkan Permensos No 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS, pengusulan DTKS dapat dilakukan di wilayah setempat sesuai alamat KTP. Perlu diketahui bahwa DTKS berbasis data kependudukan, sehingga validitas data kependudukan akan mempengaruhi proses usulan data. Apabila ada warga yang merasa kurang mampu dan membutuhkan akses bansos namun belum masuk dalam DTKS, atau sudah ada dalam DTKS namun belum pernah diusulkan untuk mendapatkan bansos, dapat melaporkan diri melalui unsur pemerintah terkecil di wilayahnya (RT/RW/Kepala Dusun/Lurah) sesuai alamat KTP agar dapat ditindaklanjuti dengan kunjungan rumah dalam rangka verifikasi kelayakan keluarga tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial RI (Safwadi et al,2022).

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Sako sudah baik. Sumber daya yang ada pada Dinas Sosial menjadi penentu keberhasilan program bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Palembang, Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan dapat diketahui jika komunikasi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan bansos dalam menanggulangi kemiskinan dapat diketahui jika ketidaksesuaian data dengan jumlah penerima bantuan sosial sehinbarusgga bantuan sosial yang dibagikan tidak diterima sesuai dengan daftar penerima yang sudah ditentukan. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Palembang untuk melaksanakan kebijakan bantuan sosial ini adalah melakukan pendataan ulang dan melakukan observasi langsung supaya masyarakat yang menerima bantuan sosial benar-benar orang yang membutuhkan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu waktu yang cukup terbatas .

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih terbatas nya temuan yang peneliti temukan, oleh karena itu agar dapat dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa untuk menambah rekomendasi dan mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan baru yang dikhawatirkan akan muncul.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, R. (2021). Bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai. *Jurnal El-Thawalib*, 2(3), 167-179.
- Gunarsa, M. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus: Di Kecamatan Cibadak). *Ummi*, 97–102. <https://www.jurnal.ummi.ac.id/index.php/ummi/article/view/535%0Ahttps://www.jurnal.ummi.ac.id/index.php/ummi/article/download/535/240>
- Kalalo, M. M. K., Kimbal, M., & Kimbal, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu Di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1*(No. 1), 1–11. file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester 4/Kebijakan Sektor Publik/ksp/alfonkimbal,+Maria+Kalalo.pdf
- Maidah, A. N., Kondorura, D., & Linggi, R. K. (2018). Studi Tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Bangun Kabupaten Kutai Kartanegra. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 1765–1774.
- Mandolang, Y., LENGKONG, F. D., & Dengo, S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79).
- Masruroh, M., & Fitriani, S. (2021). Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smk Ypk Kesatuan Jakarta. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 551-562.
- Morado, R. (2021). Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di DKI Jakarta. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 122-137.
- Nazir, A. (2017). Implementasi Kebijakan E-Musrenbang Di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. *Jurnal Mandiri : Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 1(1), 8–21. <https://doi.org/10.33753/mandiri.v1i1.6>
- Parihala, Y., & Samson, R. A. (2019). Pendidikan Yang Membebaskan Masyarakat Waimite Dari Kemiskinan. *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama*, 1(1), 41–59. <https://doi.org/10.37429/arumbae.v1i1.185>
- Putri, L. A., & Mukramin, S. (2023). Kemiskinan Masyarakat Petani di Desa Bone, Kec. Bojong, Kab. Gowa. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 102–121.
- Putong, L. B., & Wahyudi, K. E. (2022). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 338-345.
- Qamariah, M., Afifuddin, A., & Suyeno, S. (2020). Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu). *Respon Publik*, 14(4), 1-7.

- Rohman, A., Sukiman, A., & Trihardianto, W. (2021). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(1), 71–84. <https://doi.org/10.51747/publicio.v3i1.709>
- Safwadi, I., Musriandi, R., Iqbal, I., Syarifuddin, Agusmadi, & Rahmatullah. (2022). Potret Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Cot Malem, Kecamatan Blang Bintang, Aceh besar. *Baktimas Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 217–223. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/BAKTIMAS/article/view/5181%0Ahttps://ojs.serambimekkah.ac.id/BAKTIMAS/article/download/5181/3794>
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Resiko Kemiskinan di Indonesia. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 62–66. <https://doi.org/10.32663/pareto.v4i1.1891>

